



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IMAM SUBCHI
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG ADMINISTRASI UMUM
3. NHK : 971829

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **12.714.500.000**

1. Tanah Seluas 2.282 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 684.600.000
2. Tanah Seluas 5.300 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 1.590.000.000
3. Tanah Seluas 25.000 m2 di KAB / KOTA GRESIK, Rp.
1.875.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 190 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.380.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 177 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.967.500.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/170 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.340.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 183 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANGERANG SELATAN, Rp. 2.207.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 3.000 m2/150 m2 di KAB / KOTA
BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.380.000.000
9. Tanah Seluas 968 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 290.400.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **100.000.000**



1. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	100.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	12.914.500.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	12.914.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.